

# **Kebijakan Uang Darurat Lampung pada Agresi Militer Belanda II di Lampung Tahun 1949**

Oleh

**Muhammad Agung Sujadi<sup>1\*</sup>, Muhammad Basri<sup>2</sup>, Suparman Arif<sup>3</sup>**  
FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung  
E-mail: [mr.sujadi@gmail.com](mailto:mr.sujadi@gmail.com) HP.085856330016

*Received: November 19, 2018 Accepted: November 29, 2018 Online Published: December 03, 2018*

**Abstract:** *Lampung Emergency Money Policy on the Netherlands Military Aggression II in Lampung 1949.* The purpose of this study was to find out about the Emergency Money Policy in the Netherlands II Military Aggression in Lampung in 1949. The method used in this study is the historical method with data collection techniques through documentation and library engineering techniques. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The results of data analysis in this paper show that the emergency money policy as well as being a legitimate payment instrument, emergency money was used as a symbol and tool of resistance against the Dutch government. The existence of the money is able to maintain the existence of the existence of Lampung Emergency Government to the Dutch Government. Emergency money can foster a sense of nationalism in the community to continue to believe and support the Lampung Emergency Government Struggle.

**Keywords:** *netherlands military aggression II, economic crisis, emergency government*

**Abstrak:** **Kebijakan Uang darurat Lampung pada Agresi Militer Belanda II di Lampung Tahun 1949.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kebijakan uang darurat pada Agresi Militer Belanda II di Lampung tahun 1949. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Historis dengan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil analisis data dalam skripsi ini menunjukkan bahwa kebijakan uang darurat selain sebagai alat pembayaran yang sah, Uang darurat dijadikan suatu simbol dan alat perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Uang tersebut mampu menjaga Eksistensi keberadaan Pemerintahan Darurat Lampung kepada Pemerintahan Belanda dan masyarakat Lampung. Uang darurat dapat menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakat untuk terus percaya dan mendukung perjuangan Pemerintahan Darurat Lampung.

**Kata kunci:** *agresi militer belanda II, krisis ekonomi, pemerintah darurat*

## PENDAHULUAN

Lampung pada sekitar tahun 1949 masih belum merupakan daerah Provinsi yang berdiri seperti sekarang ini, tetapi masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera selatan yang beribukota di Palembang. Sehingga apapun yang terjadi di Sumatera selatan maka akan berdampak juga ke Keresidenan Lampung. Hal ini dapat terlihat pada masa Agresi militer belanda dan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Pada masa PDRI Sumatera Selatan berada dalam Provinsi Sumatera. Hal ini sesuai UU No.10 Tahun 1948. Tentang Pembagiann Sumatera dalam 3 Provinsi. Sebagai Gubernur Sumatera adalah Mr. T.M Hasan (yang dalam PDRI sebagai wakil ketua PDRI), Sumatera Selatan sendiri dipimpin oleh Gubernur Militer dr. Adnan Kapau Gani. Kekuasaan PDRI di Sumatera Selatan memang berhadapan langsung dengan politik pecah belah (*divide et impera*) Belanda. Sebab pada 30 april 1948 Palembang menjadi negara boneka yang bernama Negara Sumatera Selatan (NSS), Negara Sumatera Selatan resmi berdiri 30 Agustus 1948 di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya dengan Wali Negara Abdul Malik. (Mulkarnaen Gele Harun dkk, 2015:42).

Lampung bukan termasuk Negara Sumatera Selatan namun Lampung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Gubernur Militer A.K. Gani melakukan konsolidasi di Sumatera selatan yang membawahi sejumlah keresidenan salah satunya Lampung. Kemudian dibentuk Komandan Sub-Teritorial Lampung

yang di pegang Letkol Sjamaun Gaharu. Sementara pemerintahan sipil dipegang oleh Residen RM Rukadi Wiryoharjo.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Tentara belanda melancarkan agresi ke II. Belanda berusaha untuk menduduki daerah-daerah Republik Indonesia dan kota-kota yang dipandang strategis, dalam rangka memperluas kekuasaannya untuk dapat kembali menjajah negara maupun bangsa Indonesia. Pertempuran-pertempuran dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia muncul dimana-mana di berbagai daerah pelosok tanah air demikian juga di daerah Lampung yang turut mendapatkan ancaman dan serangan militer Belanda.

Pada tanggal 1 Januari 1949 Pelabuhan Panjang yang terletak di Daerah Panjang, merupakan pintu gerbang di ujung Sumatera bagian Selatan dan termasuk territorial kekuasaan ALRI mendapat serangan dari tentara Belanda. Karena pertempuran laut tersebut, merupakan pengalaman pertama kali bagi pasukan ALRI dan keadaan persenjataan yang sangat tidak seimbang, maka pasukan ALRI diperintahkan mundur, dan sambil melakukan bumi hangus. Selanjutnya diperintahkan untuk berkumpul di Km 21 Gedongtataan, yang ditentukan sebagai markas darurat pasukan ALRI.

Agresi militer kedua di Lampung baru dimulai tanggal 1 Januari 1949, Belanda masuk ke Teluk Lampung melalui Kalianda menuju Pelabuhan Panjang. Kira-kira Pukul 05.00 pagi, kapal perang Belanda mulai menembaki Pelabuhan Panjang. Tetapi karena perlawanan dari pihak tentara kita di

Panjang, baru setelah kira-kira jam 06.00 mereka dapat mendarat di Pantai luar Pelabuhan Panjang dan di Pantai sekitar Gunung kunyit Telukbetung. Ibukota Karesidenan akhirnya dapat diduduki oleh pasukan Belanda pada hari itu juga. Karena peristiwa itu, maka pemerintahan Karesidenan Lampung, Letnan Kolonel Syamaun Gaharu dengan anggota-anggota stafnya beserta pejabat-pejabat sipil Karesidenan Lampung pada tanggal 1 Januari 1949 sudah berada di Gedong Tataan, sedangkan rombongan keluarga militer dan sipil yang mengungsi sudah berada di Pringsewu. Pada Saat itu front utara dengan bataliyon mobilnya yang dipimpin oleh Mayor Nurdin pada tanggal 1 Januari 1949 sore hari sudah berada di Kotabumi.

Pejuang dan TNI dan Rakyat anti penjajah Belanda mulai meninggalkan kota untuk berevakuasi ke daerah pedaleman. Terutama ke Gedongtataan dan Pringsewu. TNI yang tadinya terpecah belah lambat laun dapat dipersatukan kembali dibawah Komando Staf Teritorium Lampung. Letnan Kolonel Syamaun Gaharu. Pemerintah sipil pun pada tanggal 2 januari 1949 dapat memindahkan pemerintahannya ke Pringsewu. (Supangat, Dewan Harian Angk'45:10).

Pemerintahan di Lampung saat itu mengalami krisis Politik hal ini dipertegas oleh Heri Wardoyo (2008:27) Pada 5 januari 1949, di sebuah pendopo di Pringsewu diadakan musyawarah untuk menentukan pemerintahan keresidenan Lampung. Dalam Pertemuan itu hadir antara lain Komando S.T.L Letkol Syamaun Gaharu, Mayor N.S Effendy, M.Yasin dari Masyumi, H.

Abdul halim dari PSII, dan K.H Gholib dari Pringsewu. Rapat memutuskan mengangkat Letkol Mr. Gele Harun sebagai residen darurat lampung (kepala pemerintahan darurat) menggantikan Residen Rukadi yang tetap berada di daerah pemerintahan Belanda di tanjung Karang.

Proses perlihatkan kekuasaan inilah terjadi banyak peristiwa peristiwa penting dalam sejarah daerah Lampung. Salah satunya terkait masalah "Uang darurat Lampung". Suatu Kebijakan Politik yang dilakukan selama Masa Agresi Militer Belanda II tahun 1949. Suatu kebijakan untuk alat pertukaran sebagai pengganti uang Belanda dan Jepang yang tersebar pada masa agresi militer Belanda II tersebut. Kebijakan Uang Darurat Lampung Hanya berlaku di wilayah Keresidenan Lampung yang pada saat itu hanya tersisa wilayah Lampung utara.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih spesifik mengenai Kebijakan Uang Darurat pada Agresi Militer Belanda II di Lampung tahun 1949.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Mengapa Uang dijadikan kebijakan darurat pada masa Agresi Militer Belanda II di Lampung tahun 1949?"

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode penelitian historis adalah cara untuk mengumpulkan data-data pada masa lampau untuk menguji suatu kebenaran berdasarkan sumber yang ada baik data primer maupun data sekunder untuk ditarik kesimpulan menjadi data-data yang

fakta. dengan teknik pengumpulan data melalui Teknik Dokumentasi dan Teknik Kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Kualitatif.

Variabel Penelitian menurut Sumadi Suryabrata, variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti (Sumadi Suryabrata, 2012 : 25). Sementara itu mengenai pengertian variabel yang dikemukakan oleh pendapat lain, “variabel dapat didefinisikan sebagai kondisi-kondisi yang oleh peneliti di manipulasikan, di kontrol atau di observasikan dalam Suatu penelitian” (Usman Rianse dan Abdi, 2009 : 81).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian Sejarah Berdirinya Keresidenan Darurat Lampung**

Agresi militer Belanda II di Lampung dimulai tanggal 1 Januari 1949, Belanda masuk ke Teluk Lampung melalui Kalianda menuju Pelabuhan Panjang. Kira-kira Pukul 05.00 pagi, kapal perang Belanda mulai menembaki Pelabuhan Panjang. Tetapi karena perlawanan dari pihak tentara kita di Panjang, baru setelah kira-kira jam 06.00 mereka dapat mendarat di Pantai luar Pelabuhan Panjang dan di Pantai sekitar Gunung Kunyit Telukbetung. Ibukota Keresidenan akhirnya dapat diduduki oleh pasukan Belanda pada hari itu juga, Pasukan Militer yang tadinya terpecah belah lambat laun dapat dipersatukan kembali dibawah Komando Staf Teritorium Lampung. Letnan Kolonel Syamaun Gaharu.

Pemerintah sipil pun pada tanggal 2 januari 1949 dapat memindahkan pemerintahannya ke Pringsewu.

Pemerintahan di Lampung saat itu mengalami krisis Politik dikarenakan Hilangnya Residen Lampung Rukadi pada saat itu. Pada 5 januari 1949, Untuk menjalankan Roda Pemerintahan, Sebuah pendopo di Pringsewu diadakan musyawarah untuk menentukan pemerintahan keresidenan Lampung. Dalam Pertemuan itu hadir antara lain Komando S.T.L Letkol Syamaun Gaharu, Mayor N.S Effendy, M.Yasin dari Masyumi, H. Abdul halim dari PSII, dan K.H Gholib dari Pringsewu. Rapat memutuskan mengangkat Letkol Mr. Gele Harun sebagai Residen Darurat Lampung (kepala pemerintahan darurat) menggantikan Residen Rukadi yang tetap berada di daerah pemerintahan Belanda di tanjung Karang.

Proses perlihatkan kekuasaan inilah terjadi banyak peristiwa peristiwa penting dalam sejarah daerah Lampung. Salah satunya Peristiwa penyerbuan Belanda pada 1 maret 1949 yang menyebabkan Lampung dalam kondisi darurat baik ekonomi maupun militer. Kebijakan kebijakan strategis yang di ambil pemerintahan darurat Lampung membuat Lampung menjadi salah satu daerah yang sulit ditaklukan Belanda. Kebijakan tersebut berupa Kebijakan dibidang militer dan ekonomi. Karna 2 hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang darurat dalam keresidenan darurat Lampung. Dalam situasi darurat ini pemerintahan Keresidenan darurat Lampung mengeluarkan kebijakan yang dilakukan oleh residen darurat lampung dalam mempertahankan keresidenan yaitu Pembentukan Brigade Garuda Hitam dalam pertemuan 4

keresidenan, Menghindari Strategi Jepit Kepiting yang dilakukan Belanda, Mencetak uang untuk dijadikan alat pertukaran sebagai pengganti uang Belanda dan Jepang yang tersebar pada masa agresi militer Belanda tersebut.

Keresidenan Darurat Lampung berakhir setelah adanya pengakuan Kedaulatan Belanda berdasarkan Konferensi Meja Bundar. Dimana Terjadi penyerahan Kekuasaan Belanda terhadap Indonesia di beberapa daerah termasuk Lampung. Penyerahan Kedaulatan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda diadakan pada 29 Desember 1948. Keresidenan Lampung diwakili oleh Residen Darurat Lampung yaitu Mr. Gele Harun. Penyerahan kekuasaan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dilaksanakan di Lampung Utara, tepatnya pada tanggal 29 Desember 1949, bertempat di Lapangan Kotabumi yang sekarang menjadi lokasi Masjid Jami' Kotabumi. Penyerahan kekuasaan pertama kali di wilayah Kabupaten Lampung Utara, menyusul kemudian Kabupaten Lainnya yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan.

### **Kebijakan Residen Darurat Keresidenan Lampung Selama Agresi Militer Belanda II tahun 1949.**

Pemerintahan Keresidenan Darurat Lampung Setelah diresmikan langsung bergerak cepat untuk mengamankan Pemerintahan yang tersisa selama Agresi Militer yang mendapatkan Tekanan yang luar biasa dari pihak Belanda Dalam wawancara dengan bapak

Mulkarnaen Gele Harun Putera dari Bapak Gele Harun, Beliau menuturkan bahwa Pemerintahan Darurat Lampung "Pemerintahan Darurat Lampung baru 2 pekan bertugas, Pada 18 Januari 1949, Belanda menyerang dengan mendaratkan pasukan lengkap di Kota Agung yang bergerak menuju Talang Padang untuk mengepung dan menguasai Pringsewu. Serangan lain diarahkan ke Gadingrejo dan Gedong Tataan. Belanda pun akhirnya menguasai wilayah Pringsewu. Namun serangan ini sudah diantisipasi oleh Residen Darurat, Sehingga Pemerintahan dapat dipindahkan dari Pringsewu ke Talang Padang, Ulu Belu dan Way Tenong. Selepas keadaan aman wilayah pemerintahan dipindahkan ke Bukit Kemuning Lampung Utara." (Mulkarnaen Gele Harun Putera dari Bapak Gele Harun Pada 17 Februari 2018)

Pemerintahan Darurat Lampung Mengalami banyak cobaan namun Pemerintahan terus bertahan meskipun harus secara sembunyi sembunyi namun Pemerintahan terus berjalan dengan tegak dan berjalan dengan baik meskipun terdapat pengkhianatan dari kaum pribumi sendiri namun bisa di redam dan Rakyat tetap setia Pada Indonesia.

Residen Darurat setelah Resmi dilantik mengeluarkan kebijakan pertamanya untuk menghindari strategi jepitan keping Belanda. Strategi jepitan keping adalah strategi Belanda untuk mengepung pasukan keresidenan Darurat Lampung yang berpusat di Pringsewu dengan 2 arah yaitu melalui Gedong Tataan dan Kota Agung. Kebijakan itu adalah dengan memindahkan pemerintahan ke Talang Padang dengan cara menembus pegunungan

bukit barisan di Ulu belu. Kendaraan Bermotor semua tak dapat digunakan akhirnya semua kendaraan di bumi hanguskan dengan cara didorong kedalam jurang. Hal ini membuat keadaan semakin sulit bagi para pejuang khususnya kaum perempuan dan anak-anak dalam rombongan tersebut. Dalam Strategi Jepitan kepiting sendiri sering dipakai untuk menekan musuh hingga terjebak dan tak bisa bergerak. Strategi ini memang harus membuat sasaran terus menghindar jika tidak maka Keresidenan Lampung akan jatuh.

Setelah situasi di rasa aman akhirnya pemerintahan di pusatkan Bukit kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Hal ini atas Hasil rapat dan keputusan bahwa lokasi yang paling aman adalah bukit kemuning. Karena selain Lokasinya yang masih dikuasai oleh pemerintah namun juga lokasi ini sulit ditempuh oleh kendaraan perang Belanda karena banyak sungai besar dan perbukitan. Wilayah ini juga memiliki sumber daya alam, Khususnya pangan karena banyak hasil panen perkebunan yang melimpah sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup pejuang

### **Kebijakan Uang Darurat Pada masa Agresi Militer Belanda II di Lampung**

Oeang Republik Indonesia Resmi beredar pada tanggal 30 oktober 1946, ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris tehunas dan gambar belang teks UUD 1945. ORI ditandatangani oleh menteri keuangan saat itu A.A.Maramis.

ORI tidak dapat diedarkan di sumatra, maka untuk mengatasi

kesulitan keuangan, pada akhir tahun 1947 beberapa daerah di sumatra mengeluarkan jenis uang sendiri. Diantaranya, ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatra), ORISU (Oeang Repoeblik Indonesia Sumatra Utara), ORIDJA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Djambi), ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Aceh), ORIDT (Oeang Republik Indonesia Daerah Tapanuli), dan uang mandat yang dikeluarkan oleh dewan pertahanan daerah Sumatra Selatan.

### **Uang darurat sendiri diberlakukan di Lampung Tahun 1949 atau saat terjadinya.**

Agresi Militer Belanda II tahun 1949. Seperti yang dijelaskan dalam *Untaian Bunga Rampai Perjuangan Kemerdekaa di Lampung (Buku III.)* Salah satu masalah dalam Agresi Militer Belanda II adalah banyaknya mata uang Belanda yang memicu Inflasi. Berkaitan dengan ini, Gubernur Militer Sumatera mengambil tindakan menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku dan memutuskan untuk mencetak uang sendiri dengan Alat alat yang sederhana.

Terbentuknya Mata Uang ini juga berdasarkan mandat Gubernur Militer Adnan Kapau Gani. Kala Itu, Terjadi Pertemuan di Bukit Lingau pasca perjanjian Renville dimana Empat Keresidenan yang datang, Keresidenan Bengkulu yang diwakili Residen Prof. Dr. Haza malamirin dengan Komandan Berigadir Mayor Nawawi. Dari Jambi diwakili oleh Mayor Marzuki, dari Lampung diwakili oleh Mr. Gele Harun. Dan dari Keresidenan Palembang menurut kesaksian Pelda (Purn) Buchori Harun seorang Veteran Senior sekaligus Ketua

Harian angkatan 45 Kabupaten Musi Rawas . megatakam bahwa Mata Uang Residen Bengkulu waktu itu PMR, Tak ada lambang hanya berwarna merah. Palembang gambar kapal terbang, Lampung namanya ORI dan satu daerah lagi yaitu Jambi. Dalam Pertemuan tersebut diputuskan Bahwa pembentukan Uang darurat itu hanya dapat ditukarkan dengan Keresidenan setempat.

### **Uang Darurat Sebagai Simbol Perjuangan**

Agresi Militer Belanda II merupakan peristiwa yang sangat sulit bagi rakyat Lampung. Selain karena ruang pergerakan yang semakin sempit bagi para pejuang akibat didudukinya beberapa wilayah di Karesidenan Lampung, Belanda terus mengempur melalui berbagai cara dari politik, militer dan Ekonomi, Tapi juga melalui kabar palsu yang disampaikan kepada khalayak umum khususnya masyarakat Lampung bahwa Pemerintahan Lampung sudah tidak ada lagi. “Pemerintah Belanda saat itu gencar melaksanakan aksi propoganda dengan memberikan informasi palsu bahwa pemerintahan Republik Indonesia, Karesidenan Lampung sudah tidak ada lagi.” (Mulkarnaen Gele Harun dkk, 2015:103).

Pemerintahan Darurat Lampung saat itu berusaha menepis Propoganda palsu yang dilakukan Belanda salah satunya melalui kebijakan uang darurat Lampung. Uang darurat Lampung dijadikan suatu simbol perjuangan. Sebuah upaya strategis untuk mencegah disintegrasi bangsa khususnya masyarakat Lampung dengan terus menunjukkan eksistensi Pemerintahan

Darurat Lampung melalui Uang darurat. Uang darurat sebagai simbol perjuangan Sebab apabila masyarakat menggunakan uang Belanda selain merugikan ekonomi, secara tidak langsung masyarakat sama saja mengakui keberadaan dan kedaulatan Belanda atas Lampung. Uang darurat juga menjadi salah satu syarat adanya pemerintahan berdaulat sesuai Konvensi Montevideo, yaitu sebagai simbol eksistensi perjuangan.

### **Uang Darurat Sebagai Alat Perjuangan**

Perjuangan Pemerintahan Darurat Lampung pada Agresi Militer Belanda II sangat sulit sebab Belanda terus menekan Keresidenan Lampung baik dari segi Politik, Militer dan juga Ekonomi. Perjuangan terus dilakukan melalui berbagai cara, baik secara gerilya maupun diplomasi terus dilakukan Pemerintah Darurat Lampung. Namun Belanda tidak tinggal diam, Belanda ternyata berusaha melumpuhkan ekonomi masyarakat Lampung. “Salah satu masalah dalam Agresi Militer Belanda II adalah banyaknya mata uang Belanda yang memicu Inflasi. Salah satu kewaspadaan yang harus dilakukan Lampung sebagai pintu gerbang sumatera adalah masuknya “uang Jepang” yang bergoni gono dikirim dari Jawa.” (Mulkarnaen Gele Harun dkk, 2015:63).

Belanda berusaha berusaha mematikan ekonomi masyarakat Lampung dengan menyebarkan uang secara masal yang membuat nilai mata uang tidak jelas memicu terjadinya inflasi ekonomi di masyarakat. Dengan adanya uang darurat maka dijadikan alat perjuangan untuk menghidupkan

Ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat harus terus berjalan, Dengan adanya Uang darurat yang ada di keresidenan Lampung maka masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan transaksi dagang. Sebab sebelumnya masyarakat kesulitan dalam melakukan transaksi dagang dikarenakan banyak beredarnya mata uang Belanda dan Jepang. membuat nilai mata uang tidak jelas sehingga merugikan masyarakat. Dengan uang darurat ini Ekonomi masyarakat bisa terus berjalan sebab sudah adanya Nilai tukar yang jelas.

### **Kronologis Dua Subtansi**

Kebijakan uang darurat yang berlaku pada agresi Militer Belanda II tahun 1949 yang telah disepakati bersama oleh empat keresidenan tadi, Setelah mendapatkan Mandat dari Gubernur militer A.K Gani kebijakan tersebut untuk mencetak uang darurat. Kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Lampung langsung mendapatkan serangan Agresi Militer Belanda II di awal tahun 1949 dalam Pemberlakuan dan Proses Percetakan Uang darurat di Lampung terdapat 2 Versi Sejarah yaitu Versi Ahmad Akuan dan Versi Gele Harun.

### **Percetakan Uang Darurat Versi Ahmad Akuan**

Berdasarkan Kesaksian dari catatan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Cabang Lampung Utara, H. Saleh Ahmad menyebutkan bahwa kebijakan tersebut Baru dapat diterapkan pada Bulan maret 1949 di Kotabumi. sebelumnya pada tanggal 1 Januari malam hari diadakan Rapat yang dihadiri oleh Dan Yon Mobil Kapten Nurdin Panji, Bupati Lampung Utara Ahmad Akuan dan Para Tokoh Masyarakat serta

Pimpinan Partai politik dikarenakan kondisi politik yang sangat gentng dibentuklah Pemerintahan Keresidenan Lampung di Kotabumi untuk sementara dan Ahmad Akuan Bupati Lampung Utara ditunjuk sebagai Residen Darurat, Sambil menunggu berita lebih lanjut dari Sub Teritorial Lampung di Lampung selatan. Pada 7 Januari 1949, Pemerintahan Darurat Keresidean Lampung di Kotabumi dibubarkan setelah diangkatnya Mr. Gele Harun Nasution sebagai Residen Darurat Lampung dan RA. Basyid sebagai Wakil.

Pada Bulan Maret 1949 diputuskan Untuk mencetak Uang Darurat yang ditanda tangani oleh Kapten Nurdin Panji Komandan Front Utara dan Bupati Ahmad Akuan. Keputusan ini diambil Karena Pada waktu itu kesulitan mendapatkan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang darurat tersebut di cetak di kantor Bupati Lampung Utara Ahmad akuan yang lokasinya sekarang menjadi Gedung Juang '45 di Jalan Jendeal Sudirman No.28 Kotabumi. Sedangkan bangunan Asli Kantor Bupati Lampung utara telah di Bumi hanguskan pada saat Pasukan belanda menyerbu Kotabumi pada Tanggal 23 Mei 1949. (catatan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) H. Saleh Ahmad: 2006).

Dalam catatan hidup Ahmad Akuan, Bupati lampung utara 1958, di Kotabumi mencetak uang yang diberi nama "uang darurat". ada juga yang menyebutnya "uang akuan". Uang ini dapat ditukar dengan Hasil bumi yang sudah dikumpulkan oleh Komandan Front Utara yang sudah diberikan Surat Tanda Utang atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang ditanda tangani Komandan

Front Utara. Uang ini dapat ditukarkan dengan Uang RI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dengan Nilai tukar Rp1 Uang RI. Bahkan surat surat hutang yang telah dibuat pun dibayar oleh Pemerintah Pusat Sebagaimana mestinya.

### **Percetakan Uang Darurat Versi Residen Gele Harun**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Abdul Ghani pada 13 Februari 2018 seseorang yang pernah bekerja sebagai mekanik radiator pencetak uang tersebut. Pada saat itu usia beliau masih 18 tahun bekerja sehari hari sebagai Petani dan Mekanik Radiator mesin. Menurut Abdul Ghani Uang dicetak dengan mesin yang digunakan berupa mesin cetak yang agak besar dan diletakan dibagian bawah rumah ciri khas adat semendo yaitu bagian bawah rumah. Kertas yang sudah berhasil dicetak kemudian diangkut ke bagian rumah atas. Lalu uang tersebut dikumpulkan dan dikirim ke kotabumi untuk di distribusikan. Selama pencetakan uang tersebut Mr. Gele Harun selalu mengawasi namun dengan cara menyamar dengan cara jengot dan berewok untuk menutupi identitasnya. Karena sebisa mungkin residen darurat harus menyembunyikan diri agar tak tampak mata mata Belanda yang selalu mengintai. (wawancara dengan bapak Abdul Ghani pada 13 Februari 2018)

Menurut Abdul Ghani uang yang telah dicetak dilantai Bawah rumah kemudian diangkut Keatas rumah. Lalu uang tersebut dikumpulkan dan dibawa ke Kotabumi. Selanjutnya Abdul Ghani tak mengetahui Prosesnya. Meskipun Abdul Ghani tidak merinci peroses penggunaan uang darurat tersebut setelah dikumpulkan di Bukit Kemuning dibawa Kekotabumi,

Berdasarkan Sumber lain, Seperti Buku *Untaian Bunga Rampai Perjuangan di Lampung Buku III*, disebutkan bahwa uang tersebut ditanda tangani terlebih dahulu oleh Ahmad Akuan, Buapati Lampung Utara. Lalu dijadikan Alat Transaksi. Untruk keperluan membeli beras dan bahan makanan lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan uang darurat tersebut.

Uang dibagikan kepada masyarakat dengan cara barter atau menukarkan dengan Hasil bumi yang telah dikumpulkan oleh para pedagang. Setelah dikumpulkan, Komando Front Utara, Kapten M. Nurdin Panji, Memberikan Surat Tanda Utang Atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Dalam penggunaan Uang darurat tersebut Menurut hasil wawancara dengan KH.Arief Mahya yang pernah berprofesi sebagai Penerangan Masyarakat selama Masa Agresi Militer Pada 9 Februari 2018, Menjelaskan Bahwa :

Hampir Seluruh Masyarakat Keresidenan Lampung Khususnya wilayah Lampung Utara Menggunakan Uang Darurat tersebut untuk transaksi. Namun Untuk wilayah yang sudah di kuasai Belanda seperti Tanjung Karang, Metro dan Lampung selatan jarang bahkan tidak diketahui apakah menggunakan uang tersebut atau tidak. Sebab ketika itu Wilayah yang tersisa yang tidak dikuasai Belanda Hanya 1/3 Wilayah Lampung, atau bisa dikatakan Hanya kabupaten Lampung Utara yang meliputi Liwa, Krui, way kanan dan Kotabumi. (wawancara dengan KH.Arief Mahya yang pernah berprofesi sebagai Penerangan Masyarakat selama Masa Agresi Militer Pada 9 Februari 2018)

## **Pembahasan Penelitian**

Sebelum terjadinya Agresi Militer Belanda II diadakan pertemuan pada bulan Mei tahun 1948 di Lubuk Linggau membahas mengenai perjuangan setelah adanya perjanjian Renville pada Januari 1948 dalam Pertemuan yang diikuti oleh 4 Keresidenan Bengkulu, Jambi, Palembang dan Lampung. Bukan hanya menguasai secara wilayah, Belanda juga berusaha untuk menghancurkan sistem ekonomi masyarakat dengan mengimpor dan mengedarkan uang Jepang dan Belanda dari wilayah Jawa secara masal yang menyebabkan terjadinya inflasi.

Gubernur Militer Sumatera mengambil tindakan menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku dan memutuskan untuk mencetak uang sendiri dengan alat-alat yang sederhana. Dalam Pertemuan tersebut diputuskan bahwa pembentukan Uang Darurat itu hanya dapat ditukarkan dengan Keresidenan setempat. Uang ditukarkan dengan Hasil Bumi ataupun Nilai Tukar yang telah disepakati bersama oleh empat keresidenan tadi.

### **Kebijakan Uang Darurat Pada masa Agresi Militer Belanda II di Lampung**

Agresi Militer Belanda II yang terjadi di Lampung menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan sosial dan politik masyarakat Keresidenan Lampung. Serangan yang dilancarkan Belanda di seluruh penjuru Keresidenan Lampung juga menyebabkan berbagai penindasan yang membuat Pemerintahan politik Darurat Lampung terus melakukan perlawanan demi mempertahankan Keresidenan Lampung. Dominasi Belanda di Keresidenan Lampung semakin kuat sebab Belanda

memiliki keunggulan dibandingkan Pemerintahan Darurat Lampung.

Dibidang Militer Belanda memiliki berbagai peralatan militer yang canggih mulai dari kendaraan perang hingga senjata lengkap, membuat mereka dengan mudah menaklukkan berbagai daerah yang ada di Keresidenan Lampung.

Dominasi dibidang Politik Belanda jauh lebih kuat dibandingkan Pemerintahan Keresidenan Lampung, sebab Belanda saat itu sudah menguasai 2/3 wilayah keresidenan Lampung meliputi Tanjung Karang dan Lampung Selatan. Sedangkan wilayah Pemerintahan Darurat Lampung hanya meliputi wilayah Lampung Utara tepatnya Kotabumi, Waytenong, Way Kanan dan Liwa. Yang membuat kebijakan politik tidak berjalan maksimal karena berada dalam kepongkaban Belanda.

Dibidang Ekonomi Belanda berusaha untuk menaklukkan ekonomi masyarakat Lampung. Belanda menyebarkan uang Belanda dan Jepang secara masal yang menyebabkan inflasi dengan tujuan menjatuhkan ekonomi rakyat Lampung. Namun pemerintahan Residen Darurat Lampung berusaha untuk mengalahkan dominasi ini dengan adanya Kebijakan Mencetak uang Darurat yang hanya berlaku di Keresidenan Darurat Lampung.

Melihat keadaan tersebut peneliti dapat mengamati bahwa terdapat dominasi yang sangat besar dari Belanda yang berusaha menekan Pemerintahan Lampung dari berbagai cara baik politik, militer dan ekonomi. Namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kebijakan mencetak uang Darurat pada Agresi Militer Belanda II di Lampung.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melihat Ada berbagai tujuan dan alasan mengapa Uang dijadikan Kebijakan dalam masa Agresi Milliter Belanda II. Kebijakan uang darurat merupakan suatu kecerdasan lokal yang dilakukan Pemerintahan darurat saat itu. Karena uang darurat merupakan suatu bentuk perlawanan selain perang dan diplomasi. Uang darurat yang awalnya merupakan perlawanan terhadap inflasi yang dilakukan Belanda ternyata memiliki tujuan lain yaitu :

1. Ekonomi masyarakat harus terus berjalan, Dengan adanya Uang darurat yang ada di keresidenan Lampung maka masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan transaksi dagang. Sebab sebelumnya masyarakat kesulitan dalam melakukan transaksi dagang dikarenakan banyak beredarnya mata uang Belanda dan Jepang. membuat nilai mata uang tidak jelas sehingga merugikan masyarakat. Dengan uang darurat ini Ekonomi masyarakat bisa terus berjalan sebab sudah adanya Nilai tukar yang jelas.
2. Menjaga Eksistensi keberadaan Pemerintahan Darurat Lampung dan NKRI. Adanya uang darurat ini Pemerintah darurat berusaha untuk menunjukkan ke masyarakat Lampung dandunia. Khususnya Pemerintahan Belanda bahwa Pemerintahan Darurat Lampung Masih ada dan terus berjuang mempertahankan Keresidenan Lampung. Uang darurat juga menjadi salah satu syarat adanya pemerintahan berdaulat sesuai Konvensi Montevideo, yaitu sebagai simbol eksistensi perjuangan.

3. Uang darurat juga dapat menumbuhkan rasa Nasionalisme di masyarakat untuk terus percaya dan mendukung Perjuangan Pemerintahan Darurat Lampung. Sebab apabila masyarakat menggunakan uang Belanda selain merugikan ekonomi, secara tidak langsung masyarakat sama mengakui keberadaan dan kedaulatan Belanda atas Lampung.

Dari hasil penelitian diatas kita bisa melihat bahwa uang darurat memiliki nilai yang sangat fungsional sebagai suatu kebijakan dalam pemerintahan darurat. Uang darurat merupakan suatu kecerdasan lokal sebab bukan hanya mengatasi masalah ekonomi masyarakat tapi juga bisa dijadikan suatu simbol alat perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan adanya uang tersebut selain sebagai alat transaksi yang sah juga membuat masyarakat memiliki semangat untuk terus berjuang membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah Pemerintahan Darurat Lampung.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Agresi Militer Belanda II yang terjadi di Lampung menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan sosial dan politik masyarakat Keresidenan Lampung. Serangan yang dilancarkan Belanda di seluruh penjuru Keresidenan Lampung juga menyebabkan berbagai penindasan yang membuat Pemerintahan politik darurat Lampung untuk terus melakukan perlawanan demi

mempertahankan Keresidenan Lampung.

Dominasi Belanda sangat besar dalam Agresi Militer Belanda II di Lampung. Dengan Pasukan Belanda dengan peralatan militer yang lengkap mampu menguasai wilayah Keresidenan Lampung dengan cepat dan mudah. Akhirnya dibentuklah pemerintahan darurat Lampung yang berpusat di Lampung Utara. Belanda juga sengaja mengacaukan ekonomi masyarakat dengan menyebarkan Uang Jepang dan Belanda secara Masal yang menyebabkan Inflasi ekonomi di Keresidenan Lampung.

Untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi pada Agresi Militer Belanda II tersebut. Pemerintahan darurat Lampung mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat penting yaitu dengan Mengeluarkan uang darurat resmi yang hanya berlaku di Keresidenan darurat Lampung. Selain sebagai Alat pembayaran yang sah, Uang darurat ini juga memiliki berbagai fungsi dalam perjuangan menghadapi serangan Belanda bukan hanya mengatasi masalah ekonomi masyarakat tapi juga bisa dijadikan suatu simbol dan alat perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan adanya uang tersebut mampu menjaga Eksistensi keberadaan Pemerintahan Darurat Lampung dan NKRI kepada Pemerintahan Belanda dan Seluruh masyarakat. Uang darurat juga dapat menumbuhkan rasa Nasionalisme di masyarakat untuk terus percaya dan mendukung Perjuangan Pemerintahan Darurat Lampung.

### **Saran**

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Kebijakan Darurat Mencetak uang

pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1949, penulis memberikan sejumlah saran-saran antara lain:

1. Kepada pemuda-pemudi seluruh bangsa Indonesia khususnya pemuda-pemudi daerah Lampung, agar lebih memperhatikan, menghargai dan mempelajari sejarah-sejarah agar peristiwa yang kelam tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.
2. Kepada seluruh kalangan masyarakat di Indonesia khususnya di daerah Lampung, hendaknya kita dapat mengambil hikmah bersama atas peristiwa masa lampau dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengalaman untuk patuh terhadap aturan dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewan Harian Daerah Angkatan 45. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung buku III*. Bandar Lampung: CV. Mataram.
- Heri Wardoyo dkk, 2008. *100 Tokoh Terkemuka Lampung-100 Tahun Kebangkitan Nasional*. Bandar Lampung.
- Mulkarnaen Gele Harun dkk, 2015. *Gele Harun Residen Perang Menyelamatkan kemerdekaan Masa Pemerintahan Darurat*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Sumadi Suryabrata. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman Rianse dan Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.